

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00387/2020
Lampiran : 1 (satu) dokumen

30 Maret 2020

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")
Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum**
Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2019
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Panggilan RUPST Tahun Buku 2019 Perseroan yang telah dimuat di 1 (satu) surat kabar harian yaitu Bisnis Indonesia pada tanggal 30 Maret 2020.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan,



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

| KETERSEDIAAN ENERGI |

Pertamina Perluas Layanan BBM Satu Harga

Bisnis, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memperluas program BBM satu harga dari 161 titik pada 2019 menjadi 244 titik pada tahun ini, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman

mengatakan pada tahun ini perseroan menargetkan sebanyak 83 titik di Indonesia bisa menyalurkan BBM satu harga. Beberapa titik yang menjadi target pengadaan fasilitas penyaluran BBM dengan satu harga antara lain Sumatra sebanyak 13 titik, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 21

titik, Kalimantan 13 titik, Sulawesi 7 titik, Maluku 15 titik, dan Papua 14 titik. “Kami optimis dapat mencapai target tersebut pada tahun ini untuk memastikan ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri dengan harga yang terjangkau,” katanya, pekan lalu.

Pada 2019, Pertamina telah merealisasikan BBM satu harga di 161 titik yang rampung pada Oktober 2019 atau lebih cepat 3 bulan dari yang ditargetkan pada Desember 2019. Salah satu wilayah yang telah merasakan BBM satu harga di antaranya adalah Papua, dengan salah satu wilayah-

nya kini menikmati premium dan Solar dengan harga seperti di kota besar. Sebelumnya, di sejumlah wilayah di Papua, harga BBM bisa mencapai Rp70.000—Rp100.000 per liter. “Di awal 2020 ini kami sudah merealisasikan BBM satu harga di Kabupaten Sigi, Palolo, Sulawesi Tengah sambil paralel

kami juga mempersiapkan untuk wilayah lainnya,” jelasnya. Program BBM satu harga merupakan program untuk meratakan harga BBM di Indonesia agar masyarakat yang tinggal di wilayah terluar, tertinggal, terdepan bisa merasakan harga BBM sesuai ketentuan pemerintah. (Muhammad Ridwan)

| PEMBANGKIT TERDAMPAK COVID-19 |

PLN JAMIN KEANDALAN

Bisnis, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menjamin keandalan pasokan listrik nasional tetap terjaga, kendati sejumlah proyek pembangkit listrik terdampak pandemi virus corona (COVID-19).

Yanita Petriella
yanita.petriella@bisnis.com

Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Djoko R. Abumanan tidak menampik terjadinya penundaan operasional sejumlah pembangkit akibat merebaknya COVID-19, mengingat banyaknya proyek pembangkit yang tergantung dari China, baik untuk peralatan maupun tenaga kerja. Para pekerja asing yang mengerjakan proyek pembangkit listrik, jelasnya, tidak dapat visa masuk ke Indonesia sejak imigrasi tidak lagi menerbitkan visa. Namun, Djoko memastikan mundurnya jadwal pembangunan ataupun pengoperasian proyek pembangkit listrik tidak akan mengganggu pasokan maupun jumlah cadangan daya. “Karena saat ini sudah berada di angka 30% ke atas sehingga aman untuk menjamin keandalan pasokan listrik,” ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Sebelumnya, Global Energy Monitor (GEM) memproyeksikan potensi kerugian investasi terhadap 11 proyek PLTU di Indonesia yang bakal tertunda pembangunannya ataupun operasionalnya akibat

pandemi COVID-19 sekitar US\$13,1 miliar atau setara dengan Rp209,6 triliun (asumsi kurs Rp16.000). (*lihat grafis*) Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan secara umum, keterlambatan proyek akan menyebabkan terjadinya *cost over run*, yang artinya *capital expenditure* proyek akan bertambah tergantung pada lamanya keterlambatan yang terjadi di setiap proyek. Selain itu, pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi di Indonesia tahun ini dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5%. Tahun depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan juga hanya sekitar 5%. Dengan demikian, dia menghitung bakal ada *over supply* yang cukup besar di sistem PLN pada 1 tahun—2 tahun mendatang jika proyek itu terus dijenjot. “Bisa jadi PLN menunda lagi COD [*commercial operation date*] atau re-negosiasi agar *capacity payment* tidak terlalu tinggi. Ini juga menyebabkan kerugian tambahan bagi IPP [produsen listrik swasta].”

TERTUNDA

Sejumlah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru di Indonesia diperkirakan bakal tertunda operasionalnya akibat pandemi virus corona (COVID-19). Global Energy Monitor memproyeksikan potensi kerugian investasi terhadap 11 proyek PLTU yang tertunda itu mencapai US\$13,1 miliar.

Penundaan Konstruksi Pembangkit

Pembangkit	Kapasitas (MW)	Perkiraan Kerugian (US\$ Juta)*
PLTU Cirebon	1.000	1,6
PLTU Jawa-7	2.000	3,2
PLTU Bengkulu	400	0,6
PLTU Nagan Raya	400	0,6
PLTU Mulut Tambang Sumsel-	1.600	1
PLTU Mulut Tambang Sumsel-8	1.200	1,9
PLTU Tanjung Jati B	2.000	3,2
PLTU Kalbar-1	200	0,3
PLTU Kaltengseng-1	200	0,3
PLTU Sulbagut-1	100	0,1
PLTU Sulbagut-3	100	0,1
Total	10.848	13,1

* Sumber: Kementerian ESDM & PLN, Diloah



Lututan: *Asumsi kurs Rp16.000
Sumber: Global Energy Monitor

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

Dengan mata acara sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
- Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020;
- Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
- Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 08/2019”);
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Mata acara Rapat ke-6 yaitu Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2019 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan, memperhatikan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dan merujuk Bab II butir 5 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 (“Permen BUMN 08/2015”) jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 (“Permen BUMN 11/2015”) tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (“PMN”) Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN sesuai dengan periode tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan, selama tambahan dana PMN tersebut belum habis digunakan.
- Untuk mata acara Rapat ke-7 yaitu Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan pemberlakuan Permen BUMN 08/2019 dengan melalui pengukuhan Permen tersebut dalam RUPS sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Permen BUMN 08/2019.
- Mata Acara Rapat ke-8 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya terkait perubahan Pasal 1 ayat 1 Tentang Nama Dan Tempat Kedudukan, yaitu penyesuaian nama singkatan Perseroan yang semula “PT WIKA (Persero) Tbk” menjadi “PT Wijaya Karya (Persero) Tbk” sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata Acara Rapat ke-9, yaitu Perubahan Pengurus Perseroan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan/atau Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

CATATAN :

- Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 (7) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap sebagai salah satu undangan resmi.
- Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu pada tanggal 27 Maret 2020 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020.
- Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
- Memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”), bahan mata acara Rapat disediakan dalam kurun waktu Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara dapat diperoleh di situs web Perseroan www.wika.co.id.
- Untuk mempermudah pengaturan dan terbnyina Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan *penyebaran Corona Virus COVID-19*, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
 - Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam Pemungutan Suara. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.wika.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - Asli surat kuasa dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 - 10120 up. Data Management Departemen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 16 April 2020; atau
 - Asli surat kuasa dapat disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom pada saat pendaftaran kehadiran untuk Rapat.
 - Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs website resmi Perseroan www.wika.co.id. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut di atas bersamaan dengan mekanisme yang diatur dalam huruf a butir ini, dan pertanyaan beserta jawaban akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Yang kemudian kami akan mempublikasikan ringkasan risalah Rapat yang dibuat Perseroan melalui situs web Perseroan www.wika.co.id dan 1 (satu) surat kabar berperedaran Nasional dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan penghitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir ini.
 - Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Covid-19 yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat.

Jakarta, 30 Maret 2020
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Direksi



PT. MULTINDO AUTO FINANCE

Jl. Pandanaran No.119 A, Semarang 50243

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)					
ASET	31 DES 2019	31 DES 2018	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 DES 2019	31 DES 2018
Kas dan setara kas	124,471,073	86,999,214	LIABILITAS		
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 10,033,004 dan Rp 7,529,853 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	1,615,781,862	1,580,414,063	Utang usaha	9,640,839	11,662,431
Piutang lain-lain	10,827,015	10,040,138	Utang pajak	2,917,578	1,329,562
Biaya dibayar di muka	4,617,809	5,399,059	Biaya masih harus dibayar	2,558,502	2,531,532
Pajak dibayar di muka	5,944	8,904	Utang bank	1,372,991,685	1,338,171,876
Utang muka	15,610	2,055,000	Liabilitas imbalan pasca kerja	4,050,111	3,140,828
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 28,322,909 pada tahun 2019 dan Rp 30,946,039 pada tahun 2018	29,328,691	29,370,576	Utang lain-lain	22,300,862	33,117,910
Aset pajak tangguhan	6,401,548	6,438,801	TOTAL LIABILITAS	1,414,459,277	1,389,954,139
Aset lain-lain	24,038,502	67,638,497	EKUITAS		
TOTAL ASET	1,815,488,054	1,768,364,252	Modal saham - nilai nominal Rp 1,000,000 per saham	100,000,000	100,000,000
			Modul dasar, ditempatkan dan disetor - 100,000 saham		
			Akumulasi pengurangan kembali liabilitas imbalan pasca kerja	(1,955,593)	(1,522,610)
			Saldo laba	302,984,370	279,932,723
			TOTAL EKUITAS	401,028,777	378,416,113
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,815,488,054	1,768,364,252

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Dalam ribuan Rupiah)			
	Modal Saham	Akumulasi pengurangan kembali liabilitas imbalan pasca kerja	Total Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2018	100,000,000	(912,877)	260,548,877
Rugi komprehensif lain	-	(609,733)	-
Laba neto tahun berjalan	-	-	19,383,846
Saldo per 31 Desember 2018	100,000,000	(1,522,610)	279,932,723
Rugi komprehensif lain	-	(432,983)	-
Laba neto tahun berjalan	-	-	23,051,647
Saldo per 31 Desember 2019	100,000,000	(1,955,593)	302,984,370

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Dalam ribuan Rupiah)			
	31 DES 2019	31 DES 2018	
PENDAPATAN			
Pembayaran konsumen	299,491,657	316,553,169	
Denda keterlambatan	16,628,317	15,168,006	
Administrasi	13,435,221	10,606,395	
Denda pengakhiran kontrak	6,596,698	6,134,198	
Bunga	2,273,688	1,244,999	
Pendapatan lain-lain	2,519,113	2,481,922	
Total Pendapatan	340,945,294	352,187,789	
BEBAN			
Bunga dan provisi	160,560,099	165,359,035	
Umum dan administrasi	51,963,236	48,483,497	
Tenaga kerja	62,111,612	58,496,567	
Kerugian penurunan nilai	-	-	
Aset keuangan	7,868,007	6,734,809	
Aset non-keuangan	25,182,560	25,182,726	
Kerugian penjualan jaminan yang dikuasakan kembali	2,923,272	22,683,400	
Total Beban	310,608,736	306,539,134	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	30,336,558	25,248,655	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(7,103,280)	(5,248,558)	
Pajak tangguhan	(181,581)	(616,251)	
Total Beban Pajak	(7,284,861)	(5,864,809)	
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	23,051,647	19,383,846	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Rugi atas pengurangan kembali liabilitas imbalan pasca kerja	(577,311)	(812,977)	
Pajak tangguhan terkait	144,328	203,244	
RUGI KOMPREHENSIF LAIN	(432,983)	(609,733)	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22,618,664	18,774,113	

Catatan :
1. Informasi laporan keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota Crowe Global), dengan Partner penanggungjawab adalah Dharma Pinar di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 30 Maret 2020 yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Semarang, 30 Maret 2020
PT. MULTINDO AUTO FINANCE
Direksi